

Efisiensi Penganggaran dalam Melaksanakan Program Kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Ravita Tioria Lasmawati Simanjuntak, Manuel August Todingbua, Atus Buku
Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

Email : Ravitatio23@gmail.com, manuel_august@ukipaulus.ac.id, atus@ukipaulus.ac.id

KEYWORD

efficiency;
budgeting; work
program;
inspectorate.

ABSTRACT

The background of this study is the importance of budgeting efficiency in the implementation of work programs in the Inspectorate of Central Papua Province, especially in the General and Personnel Section. The purpose of this study is to analyze the level of budgeting efficiency and its impact on the implementation of work programs. The method used is a qualitative approach with primary and secondary data, through observation, interviews, and documentation. This study involved 9 employees at the Inspectorate to collect in-depth information about the budgeting process. The results of the study indicate that the budgeting process includes planning, preparation of the RKA, discussion, determination, implementation, and supervision and evaluation. Budgeting efficiency has been proven to support the implementation of work programs by prioritizing budget use, managing risks, and reducing unnecessary costs. However, there are inhibiting factors such as limited resources, complicated administrative procedures, and dependence on central policies. The conclusion of this study emphasizes that budgeting efficiency is crucial for the success of work programs and attention is needed to overcome existing obstacles so that budget management can be more optimal.

KATA KUNCI

efisiensi;
penganggaran;
program kerja;
inspektorat.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya efisiensi penganggaran dalam pelaksanaan program kerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, terutama di Bagian Umum dan Kepegawaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi penganggaran dan dampaknya terhadap implementasi program kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 9 pegawai di Inspektorat untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai proses penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran mencakup perencanaan, penyusunan RKA, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Efisiensi penganggaran terbukti mendukung pelaksanaan program kerja dengan memprioritaskan penggunaan anggaran, mengelola risiko, dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Namun, terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, prosedur administratif yang rumit, dan ketergantungan pada kebijakan pusat. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa efisiensi penganggaran sangat krusial bagi keberhasilan program kerja dan perlu perhatian untuk mengatasi kendala yang ada agar pengelolaan anggaran dapat lebih optimal.

PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah (Hadiwijaya & Febrianty, 2020). Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat strategis dalam memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Melalui pengawasan, evaluasi, dan pembinaan, Inspektorat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan fokus penelitian pada Efisiensi Penganggaran dan Program Kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian. Efisiensi penganggaran menjadi krusial di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan anggaran yang terbatas, setiap instansi pemerintah harus mampu memprioritaskan kebutuhan dan alokasi anggaran secara tepat (Afandi, 2018). Manajemen sumber daya manusia merupakan perekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu atau perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah: “Proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder (Farida, 2021).

Sutrisno (2016)) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah: “Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.” Menurut Hasibuan (2016) manajemen sumber daya manusia adalah “ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat” (Rivai, 2016). Efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berdampak pada pengurangan pemborosan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Moleong, 2016). Dalam konteks ini, Inspektorat Provinsi Papua Tengah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal (Ahmad & Muslimah, 2021).

Penganggaran yang efisien sangat penting bagi setiap instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Efisiensi dalam penganggaran tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pelaksanaan program kerja yang dapat mendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi penganggaran dalam melaksanakan program kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian. Stoner (2010: 9) mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian pula Sedarmayanti (2012:89) menyetujui bahwa seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output dan input atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari masukan yang digunakan (Muharam, 2007). Menurut Drucker (2011) efisiensi berarti melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat dan benar.

Arikunto(2010) penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku, pada periode tertentu di masa mendatang. Sasongko & Parulian (2020:2) Penganggaran adalah rencana kegiatan

yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Novianti et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk mengaitkan antara perencanaan dan penyediaan dana, menjelaskan bahwa Penganggaran sebagai proses perencanaan penyediaan dana. Proses penganggaran pada umumnya dilakukan setelah proses perencanaan kegiatan telah selesai. Penganggaran harus mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan saat perencanaan, sehingga dana yang akan dialokasikan untuk suatu kegiatan akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Santosa dalam Soesanto (2011:17) program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi. Hetzer (2012) berpendapat bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan dimuka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya.

Program kerja menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh sebuah lembaga maupun organisasi. Hal ini biasanya akan disesuaikan dengan visi serta misi lembaga atau organisasi itu sendiri. Artinya, setiap lembaga atau organisasi akan memiliki cara membuat program kerja yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan penerapannya. Secara garis besar, program kerja dapat dikatakan sebagai sebuah agenda rutin dalam lembaga maupun organisasi, di mana agenda tersebut disusun untuk penggunaan jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan semua pengurus di dalamnya. Contoh program kerja organisasi bisa saja tidak cocok untuk organisasi lainnya, meskipun bergerak dalam bidang yang sama.

Fenomena efisiensi penganggaran di instansi pemerintah, khususnya di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, menjadi perhatian penting dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan program kerja, terutama di Bagian Umum dan Kepegawaian, yang memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pemerintahan. Dalam melaksanakan program kerja, Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a. Keterbatasan Sumber Daya. Sumber daya manusia dan finansial yang terbatas sering kali menjadi penghalang dalam mencapai efisiensi.
- b. Birokrasi yang Rumit. Proses penganggaran yang melibatkan banyak tahap dan persetujuan dapat menghambat fleksibilitas dan responsivitas dalam pengelolaan anggaran.
- c. Perubahan Kebijakan. Kebijakan pemerintah yang sering berubah dapat mempengaruhi stabilitas dan perencanaan anggaran jangka panjang.

Penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana efisiensi penganggaran mempengaruhi pelaksanaan program kerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah lainnya dalam meningkatkan efisiensi penganggaran. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penganggaran yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan program kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Inspektorat Provinsi Papua Tengah, tetapi juga bagi studi pengelolaan anggaran di sektor

publik secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Efisiensi Penganggaran dalam melaksanakan Program Kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah (Handayani et al., 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi penganggaran dalam melaksanakan program kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki proses penganggaran, serta meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan program kerja. Implikasi dari penelitian ini mencakup potensi peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Suhardi, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini di di Bagian Umum Dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data dari data primer dan data sekunder (Creswell, 2014). Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Penelitian ini menetapkan 9 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Danang, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi pada obyek penelitian ini menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia dan finansial yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bagian Umum dan Kepegawaian. Observasi menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada tidak memadai untuk menangani seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat kemampuan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan bagi pegawai. Proses penganggaran yang melibatkan banyak tahap dan persetujuan menjadi hambatan lain yang signifikan. Observasi menunjukkan bahwa prosedur birokrasi yang rumit sering kali memperlambat proses pengajuan anggaran, sehingga mengurangi fleksibilitas dan responsivitas dalam pengelolaan anggaran. Pegawai di Bagian Umum dan Kepegawaian harus melalui berbagai lapisan administrasi sebelum mendapatkan persetujuan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi menjadi tantangan tambahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Observasi mengungkapkan bahwa kebijakan yang berubah-ubah dapat mempengaruhi stabilitas dan kepastian dalam perencanaan anggaran jangka panjang. Ketidakpastian ini menyulitkan Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menetapkan prioritas dan merencanakan kegiatan secara efektif, sehingga mengganggu kelangsungan program kerja yang telah direncanakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efisiensi dalam melaksanakan program kerja. Keterbatasan sumber daya, birokrasi yang rumit, dan perubahan kebijakan menjadi faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dan ditangani untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi. Upaya untuk mengatasi tantangan ini akan sangat penting dalam mendukung kinerja Inspektorat secara keseluruhan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, serta mendapatkan

perspektif dari pegawai terkait masalah yang telah diidentifikasi melalui hasil observasi. Wawancara terhadap unsur pimpinan, Pegawai dan staf di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Adapun wawancara dilakukan terhadap informan pada penelitian ini sejumlah 9 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Proses Penganggaran Yang Diterapkan Di Bagian Umum Dan Kepegawaian Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Proses penganggaran yang diterapkan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah umumnya mengikuti ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Proses penganggaran ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang diikuti oleh instansi pemerintah daerah, termasuk Inspektorat, sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Pada tahap ini, Inspektorat melakukan identifikasi terhadap kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Proses ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti prioritas kegiatan, target kinerja, dan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini mencakup penyusunan rencana kegiatan tahunan dan penghitungan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan rencana tersebut. Perencanaan kebutuhan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan langkah penting yang melibatkan beberapa tahap krusial. Pertama, proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan operasional kantor dan program kerja, yang mencakup pelaksanaan audit, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Selanjutnya, penentuan program prioritas dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga anggaran yang disusun dapat fokus pada kegiatan yang paling mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pelibatan seluruh komponen pegawai Inspektorat dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran yang diusulkan didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran, memastikan bahwa semua kebutuhan terakomodasi dan alokasi sumber daya dilakukan secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi.

2. Penyusunan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran)

Berdasarkan hasil perencanaan, Inspektorat menyusun dokumen RKA yang berisi rincian anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKA ini berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan langkah kunci dalam proses penganggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat didanai secara efektif dan efisien (Indonesia, 2010). RKA harus selaras dengan dokumen perancangan penganggaran yang ada, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), agar semua program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas dan visi misi Inspektorat. Proses penyusunan RKA dimulai dengan merinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran yang akan datang. Setiap kegiatan harus diuraikan dengan jelas, mencakup tujuan, metode pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Selain itu, RKA juga harus mencantumkan estimasi biaya untuk setiap kegiatan, termasuk biaya operasional, sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, RKA tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Pentingnya keselarasan RKA dengan dokumen perencanaan penganggaran terletak pada kemampuannya untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang didanai sejalan dengan

kebijakan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga memfasilitasi proses pengawasan dan akuntabilitas, karena RKA yang terstruktur dan sesuai dengan dokumen perencanaan memungkinkan Inspektorat untuk melacak pengeluaran dan hasil yang dicapai dengan lebih efektif. Dengan demikian, penyusunan RKA yang baik dan selaras dengan dokumen perencanaan penganggaran sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan program kerja Inspektorat.

3. Pembahasan dan Pengajuan Anggaran

Setelah RKA disusun, dokumen tersebut diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut. TAPD biasanya dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan melibatkan berbagai pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pada tahap ini, anggaran yang diajukan akan dianalisis dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah serta ketersediaan sumber daya. Pengajuan dan pembahasan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan tahap penting dalam proses penganggaran yang melibatkan kolaborasi dengan tim anggaran yang terdiri dari BAPERIDA dan BPPKAD. Setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) disusun, langkah selanjutnya adalah mengajukan dokumen tersebut kepada tim anggaran untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pada tahap pengajuan, RKA yang telah disusun akan diserahkan kepada tim anggaran, di mana setiap rincian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan akan dipresentasikan. Diskusi dan pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek RKA dipahami dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Tim BAPERIDA dan BPPKAD berperan penting dalam menganalisis kesesuaian RKA dengan kebijakan pemerintah daerah, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Pembahasan anggaran juga mencakup evaluasi terhadap prioritas kegiatan yang diusulkan, untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung program-program yang paling mendesak dan strategis. Proses ini menciptakan ruang untuk dialog antara Inspektorat dan tim anggaran, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya pengajuan dan pembahasan anggaran yang transparan dan kolaboratif, diharapkan hasil akhir dari proses ini adalah dokumen anggaran yang lebih solid dan akuntabel, yang siap diajukan untuk penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini memastikan bahwa Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat melaksanakan program kerjanya secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penetapan Anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Setelah melalui proses pembahasan, usulan anggaran yang diajukan oleh Inspektorat akan disahkan dalam dokumen APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini menjadi landasan hukum untuk penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Penetapan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan tahap akhir dalam proses penganggaran yang melibatkan pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang telah dibahas sebelumnya. Setelah melalui proses pengajuan dan pembahasan dengan tim anggaran yang terdiri dari BAPERIDA dan BPPKAD, RKA tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan resmi. Pada tahap ini, DPRD akan melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh Inspektorat, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sejalan dengan kebijakan publik dan prioritas pembangunan daerah. Proses ini melibatkan diskusi antara anggota DPRD dan pihak Inspektorat untuk membahas rincian anggaran serta memberikan masukan yang konstruktif. Penetapan anggaran harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, sehingga semua

pihak yang berkepentingan dapat mengawasi penggunaan dana publik. Setelah DPRD menyetujui anggaran tersebut, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disahkan. APBD ini menjadi landasan hukum bagi Inspektorat untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan penetapan anggaran yang resmi, Inspektorat dapat mulai melaksanakan program-program pengawasan dan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pelayanan publik dan pengawasan di daerah. Proses penetapan anggaran adalah langkah krusial yang memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab, mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

5. Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disetujui, Inspektorat dapat mulai melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan didanai. Pelaksanaan ini harus mengacu pada aturan yang berlaku serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan tahap kritis dalam siklus penganggaran yang dimulai setelah anggaran disetujui dan ditetapkan. Pada tahap ini, Inspektorat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pelaksanaan anggaran melibatkan penggunaan dana untuk berbagai kegiatan operasional dan program pengawasan, termasuk pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi, serta kegiatan pelatihan (diklat) untuk pengembangan kapasitas pegawai. Setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tidak terdapat penyimpangan. Selama pelaksanaan anggaran, Inspektorat bertanggung jawab untuk memonitor setiap pengeluaran, mencatat penggunaan dana, dan memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan. Laporan berkala mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja juga disusun untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengawasi proses ini. Dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Pelaksanaan anggaran yang baik juga menjadi dasar untuk evaluasi dan pertanggungjawaban di masa mendatang, serta untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Selama pelaksanaan anggaran, Inspektorat perlu melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengawasan dan evaluasi di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan tahap penting dalam proses pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan secara berkala terhadap semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, guna mengidentifikasi kemajuan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana. Inspektorat melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pengecekan terhadap pelaksanaan program, dan identifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Dengan pengawasan yang ketat, Inspektorat dapat

mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi ini meliputi analisis terhadap hasil yang diperoleh dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta penilaian terhadap dampak kegiatan terhadap masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program. Hasil dari pengawasan dan evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan kegiatan di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang sistematis tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program-program yang dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

7. Laporan dan Akuntabilitas

Inspektorat menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup rincian penggunaan anggaran, pencapaian kinerja, dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini diserahkan kepada pihak berwenang, seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk audit dan evaluasi lebih lanjut. Laporan dan akuntabilitas di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan anggaran yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik. Setelah pelaksanaan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, Inspektorat bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup rincian penggunaan anggaran, pencapaian kinerja, serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran. Laporan ini biasanya mencakup berbagai elemen penting, seperti ringkasan anggaran yang digunakan, perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi, serta analisis terhadap hasil yang diperoleh. Selain itu, laporan juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Dengan demikian, laporan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk refleksi dan perbaikan dalam proses pengelolaan anggaran di masa mendatang. Akuntabilitas menjadi aspek kunci dari laporan ini, di mana Inspektorat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan hasil yang dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat umum. Proses ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan laporan dan akuntabilitas yang baik, Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas institusi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Hal ini juga berkontribusi pada penguatan pengawasan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Proses penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan struktur yang jelas dan tahapan yang sistematis, proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Transparansi dalam pengelolaan anggaran tercapai melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk pegawai Inspektorat dan tim anggaran dari pemerintah daerah, dalam setiap tahap perencanaan, pengajuan, dan pelaksanaan anggaran. Proses ini memungkinkan semua pemangku kepentingan

untuk memahami alokasi dana dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam setiap langkah penganggaran, dimana Inspektorat bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat. Dengan menyusun laporan yang rinci dan tepat waktu, Inspektorat dapat menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif, serta berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui proses penganggaran yang transparan dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik, berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan strategis Inspektorat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan. Proses penganggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Efisiensi Penganggaran Mendukung Pelaksanaan Program Kerja Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Efisiensi penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan program kerja. Berikut adalah beberapa aspek di mana efisiensi penganggaran mendukung efektivitas dan keberhasilan program kerja sebagai berikut:

1. Membantu Inspektorat Memprioritaskan Penggunaan Anggaran untuk Program Kerja yang Paling Penting: Dengan penganggaran yang efisien, Inspektorat dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memprioritaskan program-program kerja yang memiliki dampak paling besar terhadap pengawasan dan pelayanan publik. Proses ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan yang mendesak dan relevan, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan strategis Inspektorat.
2. Membantu Mengelola Risiko Terkait Pelaksanaan Program Kerja: Efisiensi penganggaran memungkinkan Inspektorat untuk memantau dan mengevaluasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program kerja. Dengan alokasi sumber daya yang tepat dan perencanaan yang matang, Inspektorat dapat mengantisipasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Ini membantu menjaga kelancaran pelaksanaan program dan meminimalkan gangguan yang dapat disebabkan oleh risiko yang tidak dikelola dengan baik.
3. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan: Penganggaran yang efisien berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan. Dengan penggunaan dana yang optimal, Inspektorat dapat melaksanakan lebih banyak kegiatan pengawasan, seperti audit dan monitoring, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan kualitas yang tinggi. Hal ini pada gilirannya meningkatkan keandalan hasil pengawasan dan memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas publik.
4. Mengurangi Biaya yang Tidak Perlu: Dengan menerapkan efisiensi dalam penganggaran, Inspektorat dapat mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Proses penganggaran yang baik memastikan bahwa setiap pengeluaran terencana dan terukur, sehingga meminimalkan pemborosan. Hal ini tidak hanya meningkatkan penggunaan dana publik secara efektif, tetapi juga menciptakan ruang bagi alokasi anggaran untuk program lain yang lebih bermanfaat.

Efisiensi penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap program kerja dilaksanakan secara optimal. Dengan pendekatan yang berfokus pada efisiensi, Inspektorat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Salah satu aspek penting dari efisiensi penganggaran adalah kemampuan untuk memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan urgensi program kerja. Dengan penganggaran yang efisien, Inspektorat dapat mengidentifikasi kegiatan yang paling berdampak dan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang tepat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan pencapaian hasil yang diinginkan.

Selain itu, efisiensi penganggaran memungkinkan Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap pelaksanaan program kerja. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang efisien, Inspektorat dapat memantau penggunaan anggaran secara real-time, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan meminimalkan potensi pemborosan. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, berdasarkan data yang valid dan terkini. Dengan fokus pada efisiensi, Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam pelaksanaan program-programnya.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja internal Inspektorat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel menjadi hasil nyata dari upaya efisiensi penganggaran, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Efisiensi penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah bukan hanya sekadar pengelolaan dana, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efektif, Inspektorat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Efisiensi penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program kerja dilaksanakan secara optimal, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Dengan fokus pada efisiensi, Inspektorat dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efektif.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Efisiensi Penganggaran Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Pelaksanaan anggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, seperti di banyak instansi pemerintah lainnya, menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan program kerja.

Keterbatasan jumlah pegawai dan tenaga ahli di Inspektorat dapat berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan. Jika jumlah pegawai tidak memadai, maka pengawasan yang dilakukan tidak akan optimal, dan pentingnya pengawasan yang tepat dapat terabaikan.

Birokrasi yang lambat dan prosedur administrasi yang berbelit-belit seringkali memperlambat aliran anggaran. Proses yang kompleks dalam pengajuan dan pencairan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program kerja secara tepat waktu. Selain itu, sistem pengawasan yang terlalu rumit juga dapat memperpanjang waktu verifikasi dan pencairan dana.

Keterlambatan dalam pencairan anggaran menjadi masalah serius yang dapat mengganggu jadwal kegiatan pengawasan atau audit. Hal ini sering disebabkan oleh faktor administratif atau karena anggaran yang belum disetujui tepat waktu, yang berpotensi menunda pelaksanaan program. Kondisi geografis Papua Tengah, yang memiliki tantangan aksesibilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, dapat menghambat pelaksanaan program kerja Inspektorat di lapangan. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi yang efisien juga mempersulit pengelolaan anggaran, membuat proses pengawasan dan akuntabilitas menjadi kurang efektif. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal di Papua Tengah. Hal ini dapat menghambat implementasi program kerja yang harus disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. Kurangnya koordinasi antara Inspektorat dan instansi terkait seperti Bappeda dan Dinas Keuangan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran atau bahkan duplikasi kegiatan. Koordinasi yang buruk juga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Meskipun Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, risiko penyimpangan anggaran tetap ada, baik di dalam instansi sendiri maupun di tingkat pemerintahan daerah lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal atau kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Keterbatasan data dan informasi akurat dapat menyulitkan evaluasi kinerja. Pengukuran hasil dari program pengawasan sering kali sulit dilakukan dan tidak tepat, sehingga menyulitkan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran. Kebutuhan dan prioritas daerah dapat berubah sepanjang tahun, dan perubahan ini mungkin tidak selalu tercermin dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Situasi darurat atau kebijakan baru dapat memerlukan penggunaan anggaran tambahan, mengganggu rencana awal. Faktor sosial dan budaya di daerah tertentu juga dapat menjadi hambatan, di mana pemahaman masyarakat atau pegawai pemerintah mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien masih kurang, menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Inspektorat Provinsi Papua Tengah berupaya untuk mengelola anggaran secara efisien, kendala-kendala tersebut tetap dapat menghambat pencapaian tujuan program kerja. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk terus berupaya mengatasi masalah ini, misalnya dengan memperbaiki prosedur administratif, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Melalui upaya yang berkelanjutan, diharapkan Inspektorat dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi penganggaran di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program kerja, terutama di Bagian Umum dan Kepegawaian. Proses penganggaran yang dilakukan meliputi perencanaan anggaran, penyusunan RKA, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Efisiensi dalam setiap tahap penganggaran terbukti mendukung prioritas penggunaan anggaran, pengelolaan risiko, dan pengurangan biaya yang tidak perlu. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat efisiensi penganggaran, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, prosedur administratif yang rumit, serta ketergantungan pada kebijakan pusat. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk terus memperbaiki proses administratif, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mencapai tujuan program kerja dengan lebih optimal. Keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran di

sektor publik, dengan implikasi positif bagi kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2018). Manajemen sumber daya manusia (Teori, konsep dan indikator). *Riau: Zanafa Publishing*, 3.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design qualitative quantitative and mixed methods approaches* (p. 398).
- Danang, S. (2013). Metodologi penelitian akuntansi. *Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi*, 86.
- Drucker, F. P. (2011). Innovation and kewirausahaan: practicer and principles. *Diterjemahkan Oleh Rusdi Naib. Jakarta: Gelora Aksara Pratama*.
- Farida, S. I. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Hadiwijaya, H., & Febrianty, F. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Penjualan dan Stok Barang untuk Pengrajin Perkakas Rumah Tangga Berbahan Aluminium. *Ikra-Ith Abdimas*, 3(3), 84–90.
- Handayani, H., Soerono, A. N., & Ramdhani, D. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return on Asset Dan Leverage. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 162–183.
- Hasibuan, M. S. P., & Hasibuan, H. M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Hetzer, E. (2012). Central and Regional Government. *Jakarta: Gramedia*.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara. *Lembaga. Jakarta*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.
- Muharam, H. (2007). Analisis perbandingan efisiensi bank syariah di Indonesia dengan metode data envelopment analysis (Periode tahun 2005). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(3), 80–166.
- Novianti, N., Widia, E., & Heryadi, H. (2023). Determinasi Lingkungan Kerja, Motivasi, Dan Insentif Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Puskesmas Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Dimensi*, 12(3), 771–785.
- Rivai, V. (2016). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*.
- Suhardi, S. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa di Kota Batam Dengan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Benefita*, 4(2), 296–315.
- Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedelapan. *Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.